

**DAMPAK IMPLEMENTASI *VEGETABLE OIL DEVELOPMENT*
PROJECT (VODP) TERHADAP PENDUDUK DI KALANGALA, UGANDA
(2009-2011)**

Oleh:

Suci Hafizah Afwan

Email: suci.hafizah@yahoo.co.id

Pembimbing: Pazli, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional – Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293– Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research analyzes the impacts of implementation of Vegetable Oil Development Project (VODP) to local communities in Kalangala District in Uganda. VODP's main aim is to deduct Uganda's dependency of import of vegetable oil by supporting vegetable oil and palm oil production. VODP palm oil sub-project has been implementing in Kalangala, Bugala Island, as one of the efforts of Government of Uganda in reducing rural poverty. This project involves role of International Fund for Agricultural Development (IFAD) as loan donor and project supervisor, Wilmar International Ltd, Bidco Uganda Limited (BUL), Oil Palm Uganda Limited (OPUL) as the executors of the project, while the smallholders are given the chance to participate in the project by selling the fresh fruit bunches to BUL. This project binds all actors by applying public-private partnership so that they have each profit and risk. However, this research finds out that there are negative impacts in main sectors that is endangering communities' life in Kalangala.

Keywords: *Impacts, Partnership, Rural Poverty, Palm Oil Development*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi *Vegetable Oil Development Project* (VODP) terhadap penduduk di Kalangala, Uganda. VODP ditujukan untuk mengatasi permasalahan *rural poverty* (kemiskinan di pedesaan) di Uganda. *Rural* diartikan sebagai pedesaan atau daerah yang terletak jauh dari perkotaan. Secara karakteristik, kata *rural* memiliki dua pemahaman. Pertama, penduduk pedesaan biasanya tinggal di rumah di atas lahan pertanian atau di sekelompok rumah yang ditinggali

oleh kira-kira 5.000-10.000 orang di mana rumah-rumah tersebut dipisahkan oleh lahan pertanian, padang rumput, pepohonan atau semak belukar. Kedua, mayoritas penduduk pedesaan banyak menghabiskan waktu di ladang dan kebun.¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa maksud dari *rural poverty* adalah kemiskinan yang terjadi pada penduduk di suatu negara atau wilayah yang memiliki

¹ *The Rural Poverty Report 2000/2001 Fact Sheet*, diakses dari <http://www.ifad.org/media/pack/rpr/2.htm> tanggal 1 Maret 2014 pukul 16.49.

mata pencaharian utama di bidang pertanian dalam skala kecil dan berdomisili bukan di perkotaan.

Uganda memang menghadapi banyak tantangan dalam permasalahan kemiskinan. Maka dari itu, Pemerintah Uganda melakukan berbagai tindakan kerjasama dan berupaya menarik investor agar perekonomian negaranya membaik. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dalam sektor agrikultural khusus perkebunan dengan badan internasional dan perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini disebabkan karena agrikultur adalah sektor inti dalam ekonomi Uganda dan merupakan sektor terluas. Lebih dari 80% wanita dipekerjakan di sektor ini dan berkontribusi sekitar 75% produksi agrikultural.

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi VODP terdiri dari organisasi internasional dan perusahaan-perusahaan swasta, antara lain *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), Wilmar International Ltd, Bidco Uganda Limited (BUL), dan Oil Palm Uganda Limited. Sementara itu ada juga keterlibatan organisasi-organisasi yang sengaja dibentuk untuk kepentingan petani kecil, yaitu Kalangala Oil Palm Growers Trust (KOPGT) dan Kalangala Oil Palm Growers Association (KOPGA).

Proyek ini dinamakan *Vegetable Oil Development Project* (VODP) dan disetujui oleh Dewan Pengurus Eksekutif IFAD pada April 1997. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan pendapatan tunai rumah tangga antarpetani penggarap dengan menghidupkan kembali dan meningkatkan produksi minyak nabati domestik yang bekerjasama dengan sektor swasta. Proyek ini memiliki tiga sub-proyek yang berbeda: 1) pengenalan produksi minyak kepala sawit komersial Pulau Bugala di Danau Victoria; 2) pengembangan pembibitan tradisional di distrik utara, timur dan pertengahan barat Uganda; dan 3) riset dan pengembangan panen minyak esensial, yang dikendalikan di berbagai distrik.

Namun, penelitian ini memfokuskan pada sub-proyek yang pertama di mana VODP diimplementasikan di Kalangala yang berada di Pulau Bugala.²

Aktor-aktor yang terlibat dalam VODP sesuai dengan pandangan paradigma pluralis. Kaum pluralis memandang bahwa Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antarnegara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan di mana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Sementara itu, penulis menggunakan teori liberalisme interdependensi dan konsep bantuan luar negeri untuk membuktikan bahwa ketergantungan negara miskin dan negara berkembang terhadap pemberian pihak asing dengan mengatasnamakan membangun perekonomian malah memberikan banyak kerugian sebagai timbal baliknya. Liberalisme interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antarnegara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut, dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial.³

Masyarakat di negara-negara seperti Uganda, umumnya merupakan masyarakat agraris berpendapatan rendah yang lebih banyak mencurahkan kegiatan ekonomi mereka untuk produksi subsisten (pas-pasan). Pembangunan industri dan mekanisme pertanian merupakan kunci

² *Republic of Uganda: Vegetable Oil Development Project*, diakses dari http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pf/uganda/VODP.htm tanggal 31 Oktober 2013 pukul 06.38.

³ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 2006, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 77-78.

ekspansi ekonomi, namun dalam hal ini terhambat oleh kurangnya modal yang bersumber dari rendahnya produktivitas. Sedikit surplus modal yang sempat terkumpul dihabiskan oleh ledakan penduduk, urbanisasi, pengeluaran militer, konsumsi barang-barang mewah, korupsi, dan manajemen yang tidak efisien. Cara pemecahan yang mendasar, menurut pandangan konvensional, adalah menemukan sumber modal baru dan menggunakan modal yang ada dengan lebih efektif. Menurut Walter S. Jones, ada empat bentuk bantuan dari negara maju untuk negara-negara berkembang yang mendominasi teori dan praktek beraliran konvensional, yaitu⁴:

1. Bantuan luar negeri
2. Perdagangan luar negeri
3. Investasi langsung luar negeri
4. Bantuan teknis

Pearson dan Payasilian mengajukan empat teori mengenai bantuan luar negeri, yaitu :

- Aliran realis menyatakan bahwa tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah bukan untuk menunjukkan idealisme abstrak aspirasi kemanusiaan tetapi untuk proyeksi *power* nasional. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional.
- Teori ketergantungan (dependensia) menyatakan bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, merangkul elit politik lokal di negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan struktur produksi, bantuan luar negeri ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam

negara penerima bantuan sehingga para penganut teori dependensia menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan.

- Aliran moralis atau idealis menyatakan bahwa bantuan luar negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Menurut aliran idealis, negara yang lebih kaya memiliki tanggung jawab moral untuk mempererat kerjasama Utara-Selatan yang lebih besar dan merespon kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di Selatan. Moralis berpendapat bahwa bantuan luar negeri mendorong dukungan yang saling menguntungkan (*mutual supportive*) dan hubungan menguntungkan sejalan dengan pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia, hokum dan ketertiban internasional.
- Teori *bureaucratic incrementalist* menyatakan bahwa bantuan luar negeri sebagai kebijakan publik, produk dari politik domestik yang melibatkan opini publik, kelompok kepentingan, dan institusi pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politik. Teori ini juga menyatakan bahwa tujuan yang dikejar negara donor dalam lingkup kepentingan ekonomi politik internasional, antara lain kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, masalah lingkungan dan berbagai faktor dalam politik domestik.

⁴ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional*, 1992, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 232-233.

Hasil dan Pembahasan

Proyek VODP diprakarsai pada tahun 1998 atas inisiatif Pemerintah Uganda, World Bank dan IFAD. Namun, pada tahun 2004, World Bank mengundurkan diri karena menganggap VODP tidak akan mampu mematuhi kebijakan World Bank tentang kehutanan.⁵ VODP dipertimbangkan sebagai usaha agar ketergantungan Uganda terhadap minyak nabati impor berkurang dengan mendukung produksi dan pengolahan minyak nabati dan kelapa sawit. Dengan mengembangkan produksi minyak nabati nasional, proyek tersebut juga menaikkan pendapatan petani kecil.

Besarnya dana investasi pada awalnya adalah sekitar US\$ 60 juta, yaitu terdiri dari pinjaman dari IFAD sebesar US\$20 juta, US\$ 33,1 juta dari gabungan pihak swasta, sumbangan sebesar US\$ 3,8 juta dan US\$ 3,1 juta dari pemerintah dan para ahli waris. Namun, skala sub-proyek minyak kelapa sawit sengaja ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan finansial dan ekonomi. Investor swasta dan pemerintah kemudian menaikkan dana sumbangan mereka menjadi masing-masing US\$ 120 juta dan US\$ 12 juta sehingga total keseluruhan dana implementasi VODP berjumlah sekitar US\$ 156 juta.⁶ Lahan di Kalangala yang ditanami ialah seluas 10.000 hektar, di mana 6.500 hektar dikuasai oleh pihak swasta yang disebut *nucleus estate* (perkebunan inti) sedangkan 3.500 hektar sisanya dikuasai oleh petani kecil.⁷

⁵ IFAD (2011), *Republic of Uganda Vegetable Oil Development Project Interim Evaluation*, diakses dari

http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pf/uganda/vodp.pdf tanggal 3 November 2013 pukul 14.36.

⁶ *Agriculture Financing and Sector Performance in Uganda: Case Study of Donor-Funded Projects*, hal. 28, diakses dari <http://www.fowode.org/publications/AGRICPERFORMANCE/ORMANCEREPORT.pdf> tanggal 26 Maret 2014 pukul 19.16.

⁷ Sophia Gnych, *Journal: Agricultural Expansion and Biofuels in the Developing World: Including the Rural Poor and Natural Resources in*

Dalam sub-proyek pertama VODP yang dijalankan di Kalangala, keterlibatan pihak-pihak dapat diuraikan melalui mekanisme berikut ini:

1. Petani kecil menanam dan menjual tandan buah segar (*fresh fruit bunches*) kelapa sawit kepada KOPGT berdasarkan harga yang telah disepakati. KOPGT mendistribusikan FFBs tersebut ke pihak OPUL. FFBs akan diolah menjadi minyak mentah oleh OPUL. Proses selanjutnya diberikan kepada BUL dan Wilmar yang kemudian mengolah minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*) tersebut menjadi berbagai macam produk, seperti minyak goreng, mentega dan produk-produk makanan dan non-makanan olahan lainnya.
2. IFAD memberikan pinjaman dana sebagai modal para petani kelapa sawit dan pelaksanaan awal VODP melalui pemerintah Uganda. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek dan diserahkan kepada koordinator proyek yang sudah ditunjuk sebelumnya. Koordinator proyek akan membayar biaya operasional kepada KOPGT yang menjadi penengah antara petani kecil dan OPUL. Petani harus mendaftar pada KOPGT untuk berpartisipasi dalam VODP dan untuk mengakses pembiayaan dalam program pinjaman pengembangan minyak kelapa sawit yang berasal dari pemerintah dan IFAD.
3. Sebagai pihak penghubung antara OPUL dengan petani kecil, KOPGT mendistribusikan pembayaran FFBs dari OPUL ke petani kecil yang sudah menjual FFBs lewat KOPGT. Keuntungan yang didapat oleh petani yang menjual FFBs melalui KOPGT adalah persentase potongan dari pembayaran atas pembelian FFBs

Development Agendas: A Case Study of the Kalangala Oil Palm Plantation, Uganda, September 2011, Imperial College London, hal. 1-2.

dikurangi. KOPGT menerapkan sistem *voucher* untuk mengatur transaksi input dan jasa yang dibutuhkan oleh petani. Sementara itu, KOPGA juga menjadi salah satu wadah berbentuk organisasi untuk memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit di Kalangala yang juga berhubungan erat dengan KOPGT.

Analisis Dampak Implementasi VODP terhadap Sektor Kehidupan Penduduk Kalangala, Uganda

Kalangala merupakan salah satu distrik di Uganda yang terbentuk tahun 1989 dan kemudian didesentralisasikan secara penuh tahun 1996. Distrik ini terletak di Danau Victoria, barat daya Uganda. Kalangala juga terdiri dari 84 pulau yang tersebar di Danau Victoria dengan luas wilayah keseluruhan 9.066,8 km². Potensi yang dimiliki alam Kalangala yang menjanjikan apabila dikembangkan dan diolah dengan tepat membuat salah satu daerah *rural* di Uganda ini menjadi salah satu lokasi implementasi VODP, khusus sub-proyek minyak kelapa sawit.

Namun, pada kenyataannya banyak dampak negatif proyek justru merugikan penduduk Kalangala. Dampak-dampak tersebut mulai terlihat jelas pada tahun 2009 dan terus berlanjut hingga tahun berakhirnya VODP Fase I pada tahun 2011. Dampak-dampak negatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dampak Lingkungan

Secara lebih spesifik, dampak-dampak lingkungan yang diciptakan akibat implementasi VODP⁸, yaitu:

a) Dampak Negatif pada Hutan

Hutan Bugala di Kalangala terkenal memiliki keanekaragaman spesies

tanaman, burung, amfibi dan hewan yang bermacam-macam dan unik. Pembukaan lahan besar-besaran menyebabkan kerusakan habitat dan ancaman buruk terhadap keanekaragaman hayati. Pembabatan hutan di lahan publik maupun pribadi untuk penanaman kelapa sawit juga berefek pada meningkatnya eksploitasi pada persediaan hutan pokok karena manusia mencari sumber daya alternatif hasil hutan, contohnya bahan-bahan untuk mendirikan bangunan, pembuatan kapal atau perahu dan kebutuhan pertukangan menyebabkan hilangnya sumber buah-buahan, tempat berburu, obat-obatan tradisional, kayu bakar dan sebagainya.

Pembabatan hutan dengan tujuan membuka lahan untuk ditanami pohon kelapa sawit menimbulkan permasalahan lain, yaitu *deboisasi*. Kegiatan *deboisasi* yang dilakukan untuk membuka lahan baru untuk ditanami pohon kelapa sawit memusnahkan ribuan hektar pohon hutan alami. Diperkirakan sekitar 3.600 hektar hutan alami hilang untuk kepentingan penanaman pohon kelapa sawit, ditambah 100 hektar hutan Gala yang dilindungi di Kalangala.

b) Dampak Negatif pada Tanah

Terjadi kerusakan pada struktur tanah karena erosi dan keringnya lahan potensial yang biasanya menjadi sumber kehidupan penduduk yang disebut juga lahan basah (*wetlands*). Erosi tanah berubah menjadi bahaya jika prosesnya berlangsung lebih cepat dari laju pembentukan tanah. Erosi yang mengalami percepatan secara berangsur akan menipiskan tanah dan merusak lahan.⁹ Hal ini membahayakan penduduk jika semakin buruk karena dapat menyebabkan tanah longsor.

Di Uganda, lahan basah (*wetlands*) menghasilkan keuntungan nyata dan tidak nyata (*tangible and non-tangible benefits*).

⁸ Laporan Kalangala District NGO Forum, *A Study to Identify Key Issues for Engagement About The Oil Palm Project in Ssese Islands, Kalangala District: A Case Study of Buggala and Bunyama Island in Kalangala District*, Maret 2009, hal. 22-26, diakses dari <http://www.wrm.org.uy/oldsite/countries/Uganda/Kalangala.pdf> tanggal 13 April 2014 pukul 12.00.

⁹ Bab I, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20126/4/Chapter%20I.pdf> tanggal 1 Mei 2014 pukul 10.31.

Tangible benefits-nya adalah persediaan air untuk penggunaan domestik, penanggulangan permasalahan irigasi untuk agrikultur di musim kemarau, cadangan untuk pertukangan, membangun material, dan sumber makanan seperti ikan, ubi rambat, sayuran, binatang buruan dan obat-obatan. Sedangkan, *nontangible benefits*-nya adalah pengendalian banjir, penyaringan air, perlindungan terhadap badai, dan lain-lain. Tanah semacam ini juga menjadi habitat penting untuk flora dan fauna dan banyak keuntungan lain lagi, terutama untuk ketahanan pangan.¹⁰ Jika dibiarkan kering, lahan basah akan akan berbalik mendatangkan bencana bagi penduduk.

c) Dampak Negatif pada Iklim Mikro

Iklim mikro terdiri dari suhu dan kelembaban udara. Perubahan iklim mikro di satu belahan bumi dapat mempengaruhi perubahan suhu dan kelembaban udara di belahan bumi lain. Belum bisa dikatakan secara pasti dampak VODP terhadap iklim jangka pendek. Namun, kegiatan awal di mana hutan lindung dalam jumlah besar dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit memberikan efek terhadap suhu udara lokal yang semakin panas. Walaupun ketika berumur dewasa pohon kelapa sawit menjadi tempat berteduh, tetap tidak bisa dibandingkan dengan peranan besar hutan hujan tropis.

d) Dampak Negatif pada Ekosistem Air di Danau Victoria

Penggunaan fungisida, herbisida dan insektisida serta pupuk yang mengandung senyawa kalium karbonat, fosfat, dolomit, NPK, *borate* dan *kieserite* digunakan dalam dosis banyak dalam proses penanaman kelapa sawit VODP. Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut pada tanaman akan merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan di air. Pemakaian yang terlalu berlebihan menyebabkan pertumbuhan fitoplankton dan ganggang

yang juga berlebihan kemudian merusak komposisi air dan ikan yang hidup di dalamnya. Pemakaian bahan kimia menimbulkan banyak resiko terutama mempengaruhi hasil ikan yang menjadi sumber pencaharian penduduk. Permintaan ikan dari luar negeri seperti Uni Eropa pun menjadi menurun.

Total Produksi Ikan dan Ekspor ke Uni Eropa 2009-2010

Common Name	Scientific name	2009 Quantity ,000 MT	2010 Quantity ,000 MT	2009 Exports to EU	2010 exports to EU
Nile perch	<i>Lates niloticus</i>	146.0	152.6	14,08 0.44	12,37 5.56
Nile Tilapia	<i>Oreochromis niloticus</i>	36.6	38.1	Nil	Nil
Cypri nids	<i>Rastrineo bola argentea</i>	183.3	190.4	Nil	Nil
Others		0.7	0.8	Nil	Nil
TOTAL		366.6	381.9		

Sumber: *Department of Fisheries Resources Annual Report 2010/2011*

Banyak kerugian yang harus ditanggung oleh penduduk, terutama bagi nelayan karena air di Danau Victoria bergolak besar dan mengurangi hasil tangkapan ikan mereka. Akibatnya, nelayan harus menunggu dan tidak menangkap ikan dalam waktu tertentu.

2. Pelanggaran Hukum Tanah Nasional Uganda

Implementasi VODP di Uganda didasarkan pada undang-undang yang mengatur penguasaan dan kepemilikan lahan. Namun, tindakan perusahaan-perusahaan swasta justru melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum tanah nasional Uganda, yaitu sebagai berikut:

a) *Constitution of The Republic of Uganda 1995* bab 26 pasal (2) ayat(a), yakni¹¹:

¹¹ *The Constitution of The Republic of Uganda: Arrangement of The Constitution*, diakses dari http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/Constitution_of_Uganda_1995.pdf tanggal 31 Oktober 2013 pukul 14.31.

“the taking possession or acquisition is necessary for public use or in the interest of defence, public safety, public order, public morality or public health—alih tangan atau kepemilikan merupakan hal penting untuk penggunaan publik atau demi kepentingan pertahanan, keamanan publik, ketenteraman publik, moralitas publik atau kesehatan publik”.

- b) *Land Acquisition Act* 1965, merupakan undang-undang yang mengatur mengenai prosedur ambil alih lahan di Uganda. Dalam ekspansi lahan VODP, pihak Wilmar dan Bidco tidak menjalankan dengan benar prosedur yang diharuskan oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan *Land Acquisition Act*, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk ambil alih lahan, yaitu¹²:

- *Power to enter on and examine land.*
- *Declaration that land is needed for public purpose.*
- *Land to be marked out, etc.*
- *Notice to persons having an interest.*
- *Inquiry and award.*
- *Taking possession.*
- *Withdrawal from acquisition.*
- *Acquisition of part of house, manufactory or other building.*
- *Temporary occupation of waste or arable land for public purpose.*
- *End of temporary occupation.*
- *Power of Minister where claim for severance is excessive.*

- c) *National Environmental Act* 1988 bab (2). Sesuai dengan undang-undang tersebut, proyek minyak kelapa sawit VODP tidak mematuhi ketentuan 200 meter zona penyangga (*buffer zone*) antara perkebunan kelapa sawit

dengan Danau Victoria. Zona penyangga (*buffer zone*) adalah wilayah yang terletak di antara dua atau lebih wilayah lain dan berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh interaksi atau kegiatan yang dilakukan di salah satu atau di kedua wilayah tersebut.¹³

3. Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Banyak pihak meyakini bahwa penduduk Kalangala maupun orang-orang migran yang bekerja dalam VODP tidak diuntungkan dari adanya implementasi VODP karena banyak memberikan kerugian secara ekonomi, sosial dan budaya. Dampak lain yang muncul sebagai akibat dari implementasi VODP berasal dari sektor ekonomi, sosial dan budaya¹⁴, yaitu:

a) Dampak Negatif pada Sosial Ekonomi Penduduk

Implementasi sub-proyek minyak kelapa sawit VODP menimbulkan konflik antara penduduk dan pihak swasta akibat lahan yang tanpa izin dijadikan sebagai bagian dari perkebunan kelapa sawit. Ditambah lagi, akses sumber daya yang dijanjikan dapat digunakan oleh penduduk lokal tidak dipenuhi oleh pihak pelaksana VODP.

Meskipun IFAD mengakui bahwa proyek ini menyediakan pekerjaan, analisisnya menunjukkan bahwa 95% pekerjaan yang disediakan oleh pihak perkebunan diberikan kepada pekerja migran yang dibawa dari bagian lain Uganda, bukan kepada penduduk lokal. Kedatangan orang-orang migran yang bekerja dalam VODP juga menciptakan kondisi sosial yang tidak aman. Mereka

¹² *Land Acquisition Act* 1965, diakses dari <http://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/226> tanggal 31 Oktober 2013 pukul 14.35.

¹³ Arthur Ebregt dan Pol de Greve, Report: *Buffer Zone and Their Management*, Oktober 2000, Netherlands: National Reference Centre for Nature Management (EC-LNV), hal. 12, diakses dari <http://edepot.wur.nl/118089> tanggal 26 Maret 2014 pukul 13.04.

¹⁴ Laporan Kalangala District NGO Forum, *ibid*, hal. 16-22.

melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti memancing dan pennebangan pohon secara ilegal, mabuk-mabukan serta menyerang penduduk lokal. Migrasi pekerja dari berbagai daerah pun mengakibatkan munculnya resiko penyakit menular. Kebanyakan pekerja migran adalah pria dalam rentang usia yang aktif secara seksual, beresiko tinggi menularkan penyakit seksual, terutama HIV/AIDS. Angka HIV di Kalangala bahkan lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan angka HIV nasional. Menurut Direktur Layanan Kesehatan Kalangala, Dr. Hillary Bitakalamire, data penelitian dari pusat konseling dan uji sukarela HIV menunjukkan bahwa angka HIV di Kalangala berada pada 27%, sedangkan angka HIV di level nasional hanya 6%.¹⁵

Kerugian secara ekonomi lain yang dirasakan oleh penduduk adalah terjadinya kenaikan harga tanah dari sekitar 70.000-80.000 shilling per acre pada tahun 2003 menjadi kisaran 800.000 hingga dua juta shilling per acre pada tahun 2009 tergantung kategori tanahnya dari yang paling mahal ke yang paling murah, yaitu daerah pantai, daerah perbatasan dengan VODP dan daerah yang kualitas lahannya kurang produktif dan terletak jauh dari kedua lokasi tersebut.

Selain itu, perkebunan kelapa sawit VODP sangat berpengaruh pada hasil panen perkebunan milik penduduk, baik secara jumlah maupun kualitas. Alokasi lahan untuk kepentingan VODP memperburuk kondisi ketahanan pangan di Kalangala.

b) Dampak Negatif pada Sosial Ekonomi Pekerja VODP

Para pekerja tersebut dieksploitasi dalam berbagai cara, yaitu:

- Bidco menempatkan para pekerjanya dalam keadaan yang tidak kondusif di mana sembilan pekerja ditempatkan dalam dua ruangan yang

sama sementara beberapa di antaranya membawa serta anggota keluarga mereka sehingga terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Akomodasi VODP tidak mempertimbangkan faktor gender sebab pria dan wanita ditempatkan di satu tempat tinggal.

- Para pekerja menerima upah yang sangat kecil per harinya, tidak setara dengan waktu kerja mereka. Jam kerja para pekerja dibagi menjadi dua *shift*, yaitu *shift* pagi dari pukul tujuh pagi sampai pukul satu siang mendapatkan upah sebesar 2.500 shilling dan *shift* sore dari pukul tiga siang sampai pukul enam sore mendapatkan upah sebesar 1.000 shilling.
- Banyak pekerja yang tertipu pada awalnya di mana mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai supir, namun pada kenyataannya mereka malah dipekerjakan sebagai tukang cangkul atau pekerjaan berat lainnya. Kebanyakan dari mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kembali ke tempat asal mereka atau bekerja di bidang lain seperti memancing ikan.
- Upah yang dihasilkan para pekerja selama 30 hari dalam sebulan, yakni sekitar 60.000 shilling, sering dipotong sebagai harga yang harus dibayar para pekerja untuk persediaan makanan yang diberikan kepada mereka selama bekerja. Selain itu, biaya-biaya untuk kepentingan transportasi pekerja ke lokasi proyek diambil dari potongan upah pertama para pekerja. Oleh sebab itulah, penduduk lokal dan pribumi tidak berminat bekerja dalam VODP dan lebih memilih memancing ikan karena dapat menghasilkan minimal 10.000 shilling per hari sedangkan upah bekerja di VODP maksimal hanya 3.500 shilling per hari.

¹⁵ *Kalangala HIV Prevalance Rate Five Time Higher than National Rate*, diakses dari <http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=6933> tanggal 27 April 2014 pukul 15.08.

c) Dampak Negatif pada Kelangsungan Budaya Penduduk Lokal

Hutan Luugo merupakan sumber penting peninggalan Kerajaan Buganda yang kemudian mulai menghilang karena keserakahan OPUL terhadap pembukaan lahan untuk VODP. Akibatnya, ritual-ritual budaya yang biasanya dilakukan di dalam hutan juga mulai memudar. Sejumlah lahan yang diberikan atau dijual pada pihak investor adalah situs pemakaman penduduk lokal dan mereka sangat menghormati situs semacam itu. Sayangnya, tidak ada toleransi dari pihak VODP yang juga menghormati penghormatan penduduk terhadap warisan budaya.

Migrasi yang terjadi karena implementasi VODP menghasilkan interaksi dan pernikahan antara orang migran dengan penduduk lokal. Orang-orang migran membawa cara-cara, nilai dan budaya baru. Meskipun beberapa aspek baik dihasilkan dari perbedaan dan interaksi budaya tersebut, penduduk lokal mulai kehilangan warisan dan nilai-nilai budaya mereka sendiri.

Simpulan

Penanggulangan problematika *rural poverty* di negara berkembang seperti Uganda memang perlu dilakukan. Akan tetapi, solusi yang diberikan kepada penduduk pedesaan berupa pembangunan ekonomi atau pun pembangunan industri harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-hak setiap individu. Masuknya investor, baik asing maupun domestik, sering tidak lagi memedulikan kerugian-kerugian yang mesti ditanggung penduduk, sementara pemerintahnya terkesan tidak menyadari telah banyak terjadi pelanggaran dan kondisi sektor kehidupan penduduk yang mulai rusak.

Kerugian dalam sektor kehidupan penduduk Kalangala, Uganda, atas implementasi VODP yang tidak mempertimbangkan keberadaan mereka sudah terjadi ke sektor-sektor penting, yaitu lingkungan, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun diusung sebagai solusi yang akan menuntaskan masalah *rural poverty* di Uganda, VODP pada kenyataannya justru malah merusak hal-hal penting di negara tersebut. Ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Uganda.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Laporan:

Agriculture Financing and Sector Performance in Uganda: Case Study of Donor-Funded Projects. Diakses dari

<http://www.fowode.org/publications/AGRICPERFORMANCEREPORT.pdf> tanggal 26 Maret 2014.

Gnych, Sophia. *Journal: Agricultural Expansion and Biofuels in the Developing World: Including the Rural Poor and Natural Resources in Development Agendas: A Case Study of the Kalangala Oil Palm Plantation, Uganda.* September 2011. Imperial College London.

Kakuru, Willy dkk. *Total Economic Value of Wetlands Products and Services in Uganda.* The Scientific World Journal Vol. 2013. Hindawi Publishing Corporation.

Laporan Kalangala District NGO Forum. *A Study to Identify Key Issues for Engagement About The Oil Palm Project in Ssesse Islands, Kalangala District: A Case Study of Buggala and Bunyama Island in Kalangala District.* Maret 2009. Diakses dari

<http://www.wrm.org.uy/oldsite/countries/Uganda/Kalangala.pdf> tanggal 13 April 2014.

Buku:

Jones, Walter S. 1992. *Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Website:

Bab I. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20126/4/Chapter%20I.pdf> tanggal 1 Mei 2014.

Ebregt, Arthur dan Pol de Greve. Report: *Buffer Zone and Their Management*. Oktober 2000. Netherlands: National Reference Centre for Nature Management (EC-LNV). Diakses dari <http://edepot.wur.nl/118089> tanggal 26 Maret 2014.

IFAD (2011). *Republic of Uganda Vegetable Oil Development Project Interim Evaluation*. Diakses dari http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pf/uganda/vodp.pdf tanggal 3 November 2013.

Kalangala HIV Prevalance Rate Five Time Higher than National Rate. Diakses dari <http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=6933> tanggal 27 April 2014.

Land Acquisition Act 1965. Diakses dari <http://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/226> tanggal 31 Oktober 2013.

Republic of Uganda: Vegetable Oil Development Project. Diakses dari http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pf/uganda/VODP.htm tanggal 31 Oktober 2013.

The Constitution of The Republic of Uganda: Arrangement of The Constitution. Diakses dari http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/Constitution_of_Uganda_1995.pdf tanggal 31 Oktober 2013.

The Rural Poverty Report 2000/2001 Fact Sheet. Diakses tanggal 1 Maret 2014 dari <http://www.ifad.org/media/pack/rpr/2.htm>.